



Bangun SPAM Rp 700 Miliar

Untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Sarbagita

DENPASAR – Ketersediaan air bersih di Bali belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan air dan konsumsi masyarakat. Lonjakan pertumbuhan penduduk dan pesatnya industri pariwisata Bali menambah runyam persoalan air bersih di Bali. Berdasar fakta tersebut, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bali berencana membangun Sistem Pengelolaan Air Minum

(SPAM) Sidan. Untuk tahap awal, segera dibangun Waduk Sidan, di Gianyar. Kelak air Waduk Sidan bakal diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan air di wilayah Denpasar, Gianyar, Badung, dan Tabanan (Sarbagita).

Kepala Dinas PU Provinsi Bali I Nyoman Astawa Riadi mengatakan, proyek pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) saat ini sudah dimulai. "Proyekasinya untuk menyediakan air baku untuk wilayah Sarbagita," ujar Astawa Riadi kemarin. Selain memikirkan warga Sarbagita, Dinas PU juga berencana

membangun SPAM untuk masyarakat Buleleng dan Jembrana bagian barat. Proyek SPAM untuk dua kabupaten ini akan digarap tahun ini. "Kami akan mempergunakan waduk ikan sebagai sumber air bakunya," katanya..

Sementara untuk memenuhi kebutuhan air minum di Kota Denpasar sudah dipenuhi dengan membangun SPAM Pasar Badung dan Gianyar. Untuk pembiayaan pembangunan SPAM tersebut, kata Astawa Riadi, diperkirakan menghabiskan anggaran hampir Rp 700 miliar dengan biaya dari pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten

Buleleng. "Kami di provinsi menyiapkan reservoir dan pipa-pipa distribusi," sambungnya. Astawa Riadi menambahkan, untuk memenuhi keperluan air minum di daerah-daerah lain, pihaknya bakal memanfaatkan sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

Masalah pembiayaannya akan yang dibantu oleh Kementerian PU. Sedang pengerjaan akan dilimpahkan ke kabupaten atau kota. "Kebutuhan air minum untuk masyarakat Karangasem akan disuplai dari Telaga Waja. Tapi, baru bisa untuk menyuplai

warga di empat kecamatan. Belum semua kecamatan bisa dialiri," katanya. Dinas PU bersyukur aliran air di Karangasem masih normal meski kondisi Gunung Agung naik turun. Bahkan, terkadang masih diberlakukan buka tutup karena sumber airnya berada di Telaga Hulu.

Untuk menghidupkan mesin pada sumber airnya tersebut dengan melakukan pantauan terlebih dulu. "Kalau kondisinya bagus ya tetap mesinnya itu hidup. Itulah pembangunan air minum yang mendesak di tahun-tahun yang akan datang," pungkasnya. (zul/mus)

Edisi : Kamis, 25 Januari 2018

Hal. : 7



Radar Bali

Pelebaran Jalan Telan Rp 181, 3 Miliar

Atasi Kemacetan di Jalan Imam Bonjol

DENPASAR- Kawasan Jalan Sunset Road dipastikan bakal dipadati kendaraan hingga akhir tahun 2018. Sebab, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah VIII melalui Satker PJN Metropolitan Denpasar, melaksanakan pelebaran jalan nasional dari Jalan Imam Bonjol Denpasar atau dari Simpang Jalan

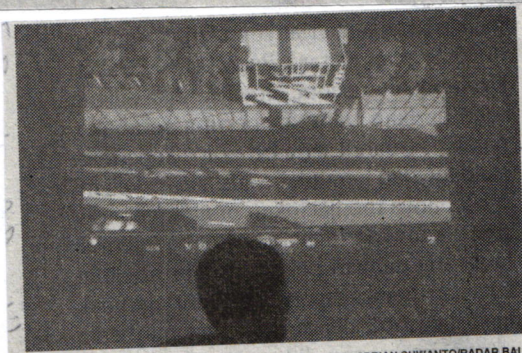
Gunung Soputan sampai Simpang Sunset Road, Badung. Pelebaran jalan ini menghabiskan anggaran Rp 181 miliar lebih yang diambil dari APBN.

Jalan yang menghubungkan Denpasar-Badung ini memang selalu macet setiap harinya. Untuk mengurangi kemacetan jalan sepanjang 2.250 meter atau 22,5 kilometer yang awalnya memiliki lebar 9-10 meter diperlebar menjadi 14 meter dengan empat jalur dan dua arah.

Kepala Satker Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Metropolitan Denpasar,

Ir. A.A Gde Sanjaya di dampingi Pejabat Pembuat Komitmen Ida Bagus Made Artamana menyatakan, proses pengerjaan proyek ini akan ada perubahan arus lalu lintas. Ini, setelah rapat koordinasi dengan Ditlantas Polda Bali, Polresta Denpasar Dishub.

Artamana optimis proyek ini dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan kontrak yakni selama 400 hari sejak tandatangan kontrak 27 November 2017 lalu dan diprediksi selesai 31 Desember mendatang. (feb/dot)



ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

INFRASTRUKTUR: Rencana pelebaran Jalan Imam Bonjol Denpasar sepanjang 22,5 kilometer ini akan dikebut hingga akhir tahun 2018.

Edisi : Kamis, 25 Januari 2018

Hal. : 4



Radar Bali

PROYEK PLTU

Warga Gugat SK Gubernur

DENPASAR-Perwakilan masyarakat Celukan bawang, Buleleng, bersama Greenpeace Indonesia, Rabu kemarin (23/1) mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mereka didampingi tim kuasa hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Bali, I Ketut Mangku Wijana dkk selaku perwakilan masyarakat terdampak dan organisasi lingkungan hidup (penggugat).

Mereka menggugat surat keputusan (SK) Gubernur Bali Nomor. 660.3/3985/IV-A/DISPMPPT tentang pemberian izin lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara Celukan Bawang 2x330 MW yang diterbitkan Gubernur Bali. "Kami mengajukan upaya hukum gugatan ini dengan beberapa alasan yang sangat mendasar. Salah satunya karena SK Gubernur Bali diterbitkan tanpa adanya pelibatan masyarakat yang akan terdampak proyek ini," ujar Direktur YLBHI-LBH, Dewa Putu Adnyana, sesuai pendaftaran gugatan di PTUN, kemarin.

Lebih lanjut, Adnyana menjelaskan dasar gugatan produk SK Gubernur Nomor 660.3/3985/IV-A/DISPMPPT diterbitkan selain berdasarkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang tidak valid dan representatif. Sehingga cacat hukum, pihaknya juga menilai produk SK yang diterbitkan gubernur Bali mengandung kekeliruan.

Ini karena tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor

► Baca *Warga...* Hal 11

Alasan Dinilai Sangat Mendasar

■ WARGA...

Sambungan dari hal 1

17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam proses AMDAL dan izin lingkungan. "Cacat karena penerbitan SK tidak sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tentang penerbitan izin lingkungan. Salah satu syarat yang tidak dipenuhi adalah pelibatan masyarakat terdampak. Juga tidak adanya papan pengumuman, konsultasi publik dan lainnya," terangnya. Selain itu, kata Adnyana SK Gubernur Bali juga

dinilai tidak didasarkan pada rencana zonasi wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZW-P3K). Fakta lainnya yang memperkuat masyarakat melakukan gugatan, kata Adnyana adalah pengembangan pembangunan PLTU Batu Bara Celukan Bawang ternyata tidak masuk ke dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) nasional. Juga Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD). Di tempat terpisah, Pemkab Buleleng, melalui dinas terkait, justru melihat potensi wilayah tersebut sangat tepat dikembangkan

kan sebagai daerah industri. Ini sebagaimana disampaikan Putu Karuna, selaku kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng, kepada koran ini kemarin. "Saya rasa untuk peruntukannya sudah tepat ya. Apalagi yang dipermasalahkan?" ujarnya. Sedangkan Kabag Hukum Setda Kabupaten Buleleng, Bagus Gede Brata, saat dikonfirmasi mengaku belum tahu. "Belum tahu ya. Saya belum dapat informasinya," singkatnya. (pra/ara/pit)

Edisi : Kamis, 25 Januari 2018

Hal. : 1 dan 11



Pungli, Mantan Kabid Perizinan Kena Setahun Bui

Kasus Pungli dan OTT di DPMPTSP Gianyar

DENPASAR-I Nyoman Sukarja, kepala Bidang (Kabid) Kabid Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Gianyar yang sebelumnya didudukkan sebagai kasus pungutan liar (Pungli)

KENA SETAHUN: I Nyoman Sukarja dikawal petugas setelah menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor, kemarin.

dan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Rabu (23/1) malam akhirnya diganjar hukuman 1 tahun penjara.

Selain penjara, sidang dengan Majelis Hakim pimpinan I Wayan Sukanila ini juga mengganjar Sukarja dengan hukuman denda sebesar Rp 50 juta subsidi 3 bulan kurungan.

Sesuai amar putusan, vonis hakim yang lebih ringan 4 bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hari Soetopo yang sebelumnya menuntut terdakwa hukuman pidana selama 14 bulan penjara, denda Rp 50 juta subsidi lima bulan kurungan. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Nyoman

Sukarja dengan hukuman pidana selama 1 tahun penjara dan membebaskan terdakwa membayar denda sebesar Rp 50 juta, dengan ketentuan apabila terdakwa tak mampu membayar hingga putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap maka terdakwa dapat menggantinya dengan hukuman kurungan selama tiga bulan," tegas Ketua Majelis Hakim Sukanila. Atas putusan ini, terdakwa maupun JPU sama-sama menyatakan pikir-pikir.

Sebagaimana diketahui, hingga perkara ini bergulir berawal dari kedatangan saksi korban Dewa Nyoman Oka Trisandi ke kantor DP-



ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

MPTSP Gianyar untuk mengurus perpanjangan TDUP dan TDP, sekitar Mei 2017 silam.

Di kantor terdakwa, saksi disodorkan sejumlah syarat dan diberikan blangko. Singkat kata, saksi korban dimintai uang Rp 15 juta sebelum akhirnya dibekuk polda Bali.

Dalam penangkapan oleh personel Polda Bali, selain Sukarja juga ditangkap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Gianyar, I Ketut Mudana. Namun berselang beberapa lama sebelum dilimpahkan, tiba-tiba Mudana dibebaskan. (pra/dot)

Edisi : Kamis, 25 Januari 2018

Hal. : 4



INFRASTRUKTUR



M. BASIR/RADAR BALI

TAMBAL SULAM: Pekerja memperbaiki jalan dekat TL Jalan Sudirman, Kota Negara, kemarin.

Baru Diperbaiki, Jalan Rusak Lagi

NEGARA - Jalan Denpasar - Gilimanuk, di wilayah Kota Negara, tepatnya di sebelah barat lampu *traffic light* Sudirman, diperbaiki lagi. Sejumlah pekerja pemeliharaan jalan terlihat menambal jalan yang sudah berlubang. Padahal, perbaikan terakhir dilakukan akhir tahun lalu tepatnya 14 Desember 2017. Saat perbaikan waktu itu, Yoni Sathia, saat masih menjadi PPK 03 Cekik-Batas Kota Tabanan BPJN VIII mengatakan, beberapa titik ruas jalan sering terjadi kerusakan seperti di jalan TL dalam Kota Negara.

Kondisi jalan di perempatan itu menurutnya memerlukan penanganan khusus. Karena terkena tekanan kendaraan berat saat pengereman. Penyebab jalan berlubang ini, selain karena hujan, faktor kendaraan yang melintas sangat berpengaruh. Kendaraan dengan muatan berat semakin menambah parah lubang.

Hal tersebut juga berdasarkan survei beban dan traffic yang dilakukan selama beberapa bulan terakhir. Menurutinya, jumlah truk per hari yang melintas mencapai 3.000 truk dengan beban terberat tercatat tiga kali beban standar untuk desain jalan nasional yang dilalui. (bas/han)

Edisi : Jumat, 26 Januari 2018

Hal. : 9



NON PERBANKAN

Enam LPD di Badung Enggan Diaudit

MANGUPURA - Ada enam Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dari 91 LPD di Kabupaten Badung yang tidak mau diaudit tahun 2017 lalu. Alasan mereka karena enam LPD tersebut sudah melakukan audit mandiri. "Nama-nama LPD kami tidak bisa publikasi. Karena sesuai komitmen pelaksanaan audit hanya untuk konsumsi intern LPD itu sendiri," kilah Kabag Perkonomian Setda Badung A.A Sagung Rosyawati kemarin (25/1).

Menurutnya, enam LPD tersebut sebenarnya bersedia diaudit. Asal audit dilakukan sebelum audit mandiri dilakukan. "Kami sudah menerima dokumen pendukung terhadap LPD yang melakukan audit secara mandiri," katanya. Seperti diketahui di Badung ada 122 LPD. Namun dari 91 LPD yang diaudit oleh Pemkab Badung, ada enam LPD yang melakukan audit secara mandiri.

Untuk audit di tahun 2018 telah dianggarkan Rp 1,2 miliar. Audit dilakukan terhadap 31 LPD. Yakni 5 LPD di Abiansemal, 10 LPD di Mengwi, 1 LPD di Kuta Utara, 4 LPD di Kuta, 5 LPD di Kuta Selatan, dan 6 LPD di Petang.
(dwi/mus)

Edisi : Jumat, 26 Januari 2018

Hal. : 7



Radar Bali

Pendapatan Besakih Melebihi Target

SEMENTARA itu, meski sempat diwarnai pro dan kontra saat dibuka lagi karena Gunung Agung masih berstatus Awas dan di zona bahaya, ternyata tidak mempengaruhi kunjungan turis masuk ke Pura Besakih, Karangasem. Pendapatan dari kunjungan wisatawan juga melebihi target yang telah ditetapkan ■

► Baca **Pendapatan...** Hal 11

Ditarget Rp 1,9 M, Dapat Rp 2 M

■ PENDAPATAN...

Sambungan dari hal 1

Padahal, *pura kahyangan jagat* ini sempat ditutup dua kali. Yakni pada 23 September sampai 2 November 2017 dan 3 November sampai 26 Desember 2017. Baru 27 Desember 2017 lalu kembali dibuka untuk aktivitas wisatawan, sampai sekarang.

Menurut data Manajemen Operasional (MO) Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih, Karangasem, target pendapatan 2017 awalnya dirancang Rp 1,9 miliar mengacu pada kunjungan wisatawan ke Pura Besakih tahun 2016. Target Rp 1,9 miliar itu pun sudah dinaikkan hingga 20 persen dari tahun sebelumnya. Namun, pendapatan hingga pengujung 2017 terealisasi sebesar Rp 2 miliar lebih.

"Andaikata tidak terjadi erupsi Gunung Agung, mungkin pendapatan kami bisa sampai Rp 3 miliar. *Astungkara*, pendapatan tetap melebihi target," ujar Wakil Manajer MO Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih I Wayan Ngawit

selepas mengikuti rapat dengan Badan Pengelola Kawasan Pura Agung Besakih di kantor gubernur Bali, kemarin.

Meningkatnya pendapatan ini tergambar dari tingkat kunjungan wisatawan asing hingga 40 persen. Sementara angka kunjungan wisatawan domestik meningkat hingga 200 persen dari sebelumnya. Artinya, erupsi Gunung Agung rupanya tak menghalangi pencapaian target pendapatan yang dipasang MO. Sebab, pendapatan bisa surplus dari target yang ditetapkan,

Lebih lanjut dijelaskan Ngawit, pendapatan bersih setelah dikurangi pengembangan dan promosi 15 persen akan dibagi tiga. Sebesar 50 persen untuk Pura Agung Besakih, 25 persen untuk Pemkab Karangasem, dan 25 persen untuk Desa Pakraman. Pendapatan itu baru dibagikan setelah ada audit. Sesuai Pergub No.51 Tahun 2016, MO Besakih harus mempertanggungjawabkan kinerja selama setahun berkegiatan kepada badan pengelola yang diketuai Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta.

MO bertanggung jawab terkait sumber dana yang kami dapat di 2017 dan biaya-biaya operasional sekaligus saldo yang didapatkan MO dibentuk untuk melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan peraturan badan pengelola," tukasnya.

Di sisi lain, Sekda Provinsi Bali Cokorda Ngurah Pelayun mengatakan bahwa badan pengelola dibentuk untuk menertibkan pengelolaan di kawasan Pura Besakih. Mulai dari segi keuangan maupun keamanan.

Ditegaskan, karena sudah ada badan pengelola, semua harus satu pintu. Sebab, Pura Besakih selama ini selalu dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. Laporan keuangan dari MO Besakih saat ini tengah diaudit oleh Inspektorat Provinsi Bali. Setelah itu baru bisa diperoleh gambaran pengelolaan setahun terakhir. "Kalau semua elemen kami kasih bebas siapa nanti yang dimintai pertanggungjawabannya?," sentilnya. (san/pit)

Edisi : Jumat, 26 Januari 2018

Hal. : 1.



PROYEK PLTU

Pemprov Siap Hadapi Gugatan

DENPASAR - Pemprov Bali tidak permasalahan gugatan perwakilan masyarakat Celukan Bawang, Buleleng bersama kelompok aktivis lingkungan Greenpeace yang didampingi YLBHI - LBH Bali ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Karo Humas dan Protokol Setda Bali, Dewa Gede Mahendra menyatakan SK Gubernur Bali No 660.3/3985/IV-A/DISMPT tentang pemberian izin lingkungan PLTU Batubara Celukan Bawang, sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.

"Tidak mungkin kami mengeluarkan SK tanpa melalui satu proses. Apalagi yang dikeluarkan adalah Amdal (analisa mengenai dampak lingkungan). Semua sudah jelas dan sesuai tahapan," kata Dewa Mahendra dikonfirmasi kemarin (24/1) ■

► Baca **Pemprov...** Hal 11

Sebut Kajian Sudah Matang

■ **PEMPROV...**

Sambungan dari hal 1

Walau begitu, pihaknya tetap siap menghadapi jika gugatan tersebut di proses di meja hijau. Pihaknya akan menunjuk karo hukum dan pihak terkait untuk menghadapi gugatan. "Di negara hukum gugatan ke pengadilan

itu sah-sah saja dan wajar. Kami apresiasi dan hargai itu," tukasnya.

Pemprov juga tidak permasalahan jika Amdal dan SK yang digugat ke PTUN nantinya menjadi salah satu pokok materi gugatan. Dijelaskan, di pemerintahan setiap mengeluarkan keputusan selalu dibarengi dengan

kajian matang. SK dan Amdal juga sudah melalui proses panjang yang melibatkan banyak pihak.

"Apalagi ini Amdal, tidak mungkin kami tidak melibatkan masyarakat. Bagaimana caranya Amdal keluar kalau tidak melibatkan masyarakat? Kami tidak sesumir itulah," sodoknya. (san/pit)

Edisi : Jumat, 26 Januari 2018

Hal. : 1



UANG RASTRA DITILEP ✓

Dikembalikan, Oknum Kasi Di-Warning dan Dirotasi

NEGARA – Oknum perangkat desa dengan jabatan kepala seksi di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, akhirnya mengembalikan uang beras sejahtera (rastra) yang digunakan untuk kebutuhan pribadinya. Setelah pengembalian, Perbekel Melaya langsung memberi peringatan keras dan mengancam memberhentikannya sebagai perangkat desa.

Usman Affandi juru timbang gudang Perum Bulog Jembrana mengatakan, pihak Desa Melaya sudah datang membawa uang sebesar Rp 34 juta lebih, untuk pembayaran uang rastra dari Bulan Oktober hingga Desember. Pembayaran itu sesuai perjanjian sebelumnya. “Desa Melaya hari ini (kemarin) sudah lunas uang rastra,” ujarnya, Rabu (24/1).

Perbekel Desa Melaya I Made Mara dikonfirmasi terpisah mengatakan, pembayaran pada Bulog sudah dilakukan setelah oknum perangkat desanya Dewa mengumpulkan uang untuk mengganti uang rastra yang telah digunakan untuk kepentingan pribadinya. “Sudah beres, tadi sudah dikembalikan,” jelasnya.

Dengan pengembalian tersebut, bukan berarti masalah selesai. oknum perangkat desanya sudah diperingatkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melanggar peraturan apa pun. Perbekel memberi waktu dua minggu pada Dewa W untuk memperbaiki diri, tetapi evaluasi tetap akan dilakukan nantinya, kemudian merotasi jabatan oknum perangkat desa tersebut ke posisi yang lain. “Kalau *macem-macem*, bekerja tidak sesuai aturan saya berhentikan,” tegasnya.

Setelah pengembalian kemarin, Dewa W sudah dipanggil untuk diberi pembinaan. Menurut perbekel, bawahannya sudah meminta maaf, bahkan sampai menangis saat diberi pembinaan. “Tadi (kemarin) sampai nangis-nangis saya marahi dia,” terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pembayaran hasil penjualan beras sejahtera (rastra) dari pemerintah untuk keluarga penerima manfaat (KPM) di Jembrana tahun 2017 lalu, Desa Melaya belum menyetorkan uang dari bulan Oktober hingga Desember. Ternyata, uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi oknum perangkat desa yang menjadi kepala seksi di Desa Melaya berinisial Dewa W. (bas/han)

Edisi : Jumat, 26 Januari 2018

Hal. : 9